

# **MENUJU PEMERINTAHAN TERBUKA (*OPEN GOVERNMENT*) MELALUI PENERAPAN *E GOVERNMENT***

**Andi Heny Mulawati Nurdin**  
**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**  
henmulandi@gmail.com

## ***ABSTRACT***

*In the recent times, governments all over the world have adopted the use Information and Communication Technologies (ICTs) to improve the quality of administration especially in the public sector. This is in line with the general advocacy to reform the public sector to serve the citizens better and to enhance public sector productivity. Thus, a combination of E government factors with democratic ideas will make governments more effective. In addition, it can promote cordial relationship with the citizens in order to achieve national development. This paper explores the emerging role of E government in promoting service delivery in the Indonesian public sector. The method used is literature study with secondary data based on the results of research and opinions of experts related to the problem. The paper concludes that to achieve success in service delivery, certain measure must be taken to ensure proper implementation of ICT policies in order to achieve the desired goals and to serve the citizens better. It therefore recommends that Indonesian government should embrace E government by promoting the use of ICT facilities among the citizens and government agencies and to make policies that would sustain ICT projects in order to achieve efficiency and effectiveness in the public sector.*

**Keywords:** *open government, e government, public service, ICTs.*

## **ABSTRAK**

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah menerapkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya peningkatan kualitas administrasi di sektor publik, demikian pula di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan reformasi di sektor publik yaitu pemberian pelayanan masyarakat yang lebih baik dan peningkatan produktivitas sektor publik, perpaduan antara penerapan E government dengan ide-ide demokratis akan mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif. Selain itu, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tulisan ini mendeskripsikan penerapan E government dalam peningkatan pelayanan publik dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan data skunder berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli terkait permasalahan. Kertas menyimpulkan bahwa bagi pemerintah untuk mencapai sukses dalam penyampaian layanan, ukuran tertentu harus diambil untuk memastikan implementasi kebijakan TIK yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk melayani warga lebih baik. Karena itu merekomendasikan bahwa Indonesia pemerintah harus merangkul E government dengan mempromosikan penggunaan fasilitas TIK di antara warga negara dan lembaga pemerintah dan membuat

kebijakan yang akan mendukung proyek TIK untuk mencapai efisiensi dan efektivitas di sektor publik.

**Kata kunci:** pemerintahan terbuka, *e government*, pelayanan publik, TIK.

## PENDAHULUAN

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, *Open Government Public (OGP)* telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Empat prinsip yang diusung oleh delapan negara penggagas OGP ini, termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas tata pemerintahan yang lebih terbuka; kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, negara-negara penggagas OGP juga menyatakan bahwa mereka telah menemukan momentum dunia untuk mempromosikan transparansi, memerangi korupsi, memperkuat keterlibatan warga negara, serta menggunakan teknologi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Atas dasar ini, setiap negara peserta OGP menyatakan komitmennya untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan, mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan, menyelenggarakan standar integritas profesional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta

meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas.

Sejak tahun 2016 *OGP* yang sebelumnya hanya menjadi platform bagi pemerintah di tingkat nasional, mulai dikembangkan ke tingkat pemerintahan daerah. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengadopsi teknologi *E government* untuk meningkatkan penyampaian layanan di sektor publik dengan tujuan meningkatkan penyediaan layanan untuk manfaat dari warga. Untuk mendukung gerakan ini, seluruh kementerian telah berkontribusi memperkenalkan kebijakan untuk mendukung pergerakan teknologi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program TIK dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan warga tentang teknologi karena melalui teknologi komunikasi informasi diyakini dapat meningkatkan konektivitas antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tren transformasi teknologi di dunia yang mempromosikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memfasilitasi layanan pemerintah yang sesuai di sektor publik (Azemi, Romle & Udin, 2016: 499)

Teknologi menawarkan kesempatan untuk berbagi informasi, partisipasi publik, dan kolaborasi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi lebih banyak kepada publik dengan cara yang memungkinkan orang memahami apa yang pemerintah mereka lakukan dan untuk memengaruhi keputusan.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan ruang *online* yang mudah diakses dan aman sebagai *platform* untuk memberikan layanan, melibatkan masyarakat, dan berbagi informasi dan gagasan. Namun, akses teknologi yang adil dan terjangkau merupakan tantangan tersendiri, oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mencari peningkatan konektivitas *online* dan *mobile*, sekaligus juga mengidentifikasi dan mempromosikan penggunaan mekanisme alternatif untuk keterlibatan warga negara.

Penggunaan TIK juga dapat berdampak besar pada kemampuan sektor publik untuk membuat keputusan berdasarkan bukti, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keputusan tersebut dan mengarah pada peningkatan kinerja sektor publik dalam bentuk kebijakan, layanan dan komunikasi yang lebih baik dengan warga dan dunia bisnis. Untuk tujuan ini, Pemerintah Indonesia harus menyadari nilai data sektor publik sebagai aset strategis.

Pelibatan masyarakat sipil dan komunitas bisnis untuk mengidentifikasi praktik yang efektif dan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan masyarakat dan mempromosikan transparansi di pemerintahan juga sangat diperlukan. Peningkatan akses terhadap teknologi juga perlu di tingkatkan oleh pegawai pemerintah dan warga masyarakat. Hal yang tidak boleh terlupakan yakni bahwa teknologi adalah pelengkap, bukan pengganti, untuk informasi yang jelas, berguna, dan berguna.

Pemerintah digital “mengacu pada penggunaan teknologi digital, sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan nilai

publik. Ini bergantung pada ekosistem pemerintah digital yang terdiri dari aktor pemerintah, organisasi non-pemerintah, bisnis, asosiasi warga negara dan individu yang mendukung produksi dan akses terhadap data, layanan dan konten melalui interaksi dengan pemerintah “(OECD, 2014).

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu landasan pelaksanaan *e-Government* di Indonesia, dimana pemerintahan perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*E government* adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi dalam melakukan berbagai tugas pemerintah (Holzer & Schwester, 2011). Revolusi dalam TIK telah meningkatkan kualitas pemerintahan. Beberapa fakta telah menunjukkan bahwa melalui *E government masyarakat* mendapatkan informasi dengan baik dan meningkatnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan karena tersedianya akses yang lebih besar terhadap informasi dan kegiatan pemerintah (Akinleke, 2015).

Tulisan ini mengkaji munculnya peran *E government* dalam pemberian layanan di sektor publik di Indonesia dengan tujuan umum untuk menggambarkan tentang implementasi dan praktik kegiatan *E government* dan dampak pada produktivitas sektor publik, dan tingkat efektivitas implementasi *E government*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pemerintahan Terbuka

Pemerintahan berasal dari kata Yunani kuna, *kebernon*, yang berarti mengarahkan (Youth INC, 2005 dikutip dalam Savic, 2006). Fukuyama (2013: 3) mendefinisikan pemerintahan sebagai “kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan aturan, dan untuk memberikan layanan, terlepas dari apakah bahwa pemerintah itu demokratis atau tidak”. Oleh karena itu, tata kelola berarti pelaksanaan kekuasaan dalam rangka untuk mengarahkan sistem sosial dan proses di mana bisnis atau lembaga pemerintah melakukan latihan kontrol atas warga. Juga, tata kelola dianggap sebagai sistem dan proses untuk memastikan arah keseluruhan, efektivitas, pengawasan,

dan akuntabilitas organisasi (Cornforth, 2003). Sekali lagi, tata kelola dapat dilihat sebagai “Latihan suara politik, ekonomi, dan otoritas administratif untuk mengelola sumber daya suatu negara untuk pembangunan. Ini melibatkan pelembagaan suatu sistem di mana warga negara, lembaga, organisasi, dan kelompok dalam a masyarakat mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak mereka, dan memediasi perbedaan mereka dalam mengejar kebaikan kolektif” (Country Governance Assessment 2005)

*Open government* menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat memengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai “*Open Government*”. Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benar-benar terlihat potensi open government dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik. Febrianingsih, (2012) mendenisikan *open government* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan pasrtisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak

dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang diberikan meliputi semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mendukung *open government* menggunakan aplikasi elektronik (*e-Government*), pemerintah dibantu oleh *vendor* atau pihak ketiga untuk mendukung pencapaian atas target-target pembangunan.

### **Konsep *E-government***

Penerapan *E-government* dalam kegiatan pemerintahan terus meningkat. Ini merupakan implikasi dari seruan global untuk mereformasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan layanan pengiriman. *E-government* mulai diperkenalkan di Indonesia pada 1990-an, pada saat situs web pemerintah dikembangkan untuk memfasilitasi komunikasi (Choudrie, Umeoji, & Forson, 2012). Sejak itu, banyak kebijakan telah diperkenalkan pemerintah untuk mendorong penggunaan TIK dalam menciptakan kesadaran di antara warga dan untuk menjalankannya bisnis pemerintah.

Banyak ahli yang telah memberikan berbagai definisi untuk *E-government*. Antara lain; “*e-governnance* melibatkan penggunaan program teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan pemerintah” (Fraga, 2002). “*E-Government* digunakan oleh lembaga pemerintah teknologi

informasi (seperti Wide Area Network, the Internet, dan komputasi seluler) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan kelengkapan pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat melayani berbagai tujuan berbeda: penyampaian layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, peningkatan interaksi dengan bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses informasi, atau pemerintah yang lebih efisien. Manfaat yang didapatkan yaitu mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, pertumbuhan pendapatan, dan/atau pengurangan biaya.” (World Bank, 2016).

*E-government* bisa didefinisikan sebagai cara bagi pemerintah untuk menggunakan informasi dan komunikasi paling inovatif dengan menggunakan teknologi, khususnya aplikasi Internet berbasis web, untuk menyediakan akses bagi warga dan bisnis yang lebih mudah ke informasi dan layanan pemerintah, guna meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam lembaga proses demokratis” (Fang, 2002: 4). Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, Dawes, (2008: 86) mendefinisikan *E government* sebagai “penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung layanan publik, pemerintah administrasi, proses demokratis, dan hubungan di antara warga negara, masyarakat sipil, swasta sektor, dan negara”. Hal ini menyiratkan bahwa *E government* menawarkan peluang yang lebih baik untuk memenuhi tantangan warga.

Definisi lain dari *E government* diberikan oleh Fatile, menurutnya “*E government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi (seperti internet, World

Wide Web, dan mobile computing) oleh instansi pemerintah itu dapat mengubah hubungan mereka dengan warga, bisnis, berbagai bidang pemerintahan, lainnya” (Fatile, (2012: 125). Definisi di atas dari E government memiliki tema sentral yang tetap yaitu *E government* melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan penyampaian layanan kepada warga dan lembaga pemerintah dengan tujuan meningkatkan komunikasi yang lebih cepat antara pemerintah dan warga.

**Manfaat E government di Sektor Publik**

Saat ini, sebagian besar pemerintah telah memulai program program dengan menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pemerintah. Teknologi telah meningkatkan kegiatan pemerintahan dan telah memfasilitasi interaksi dalam lembaga publik dan swasta dengan menyediakan akses cepat ke transmisi informasi (Fatile, 2012). Peneliti telah mengidentifikasi relevansi *E government* di negara berkembang. Gianluca (2007) mengamati bahwa *E government* dapat memengaruhi transformasi di sektor publik di tiga bidang utama seperti; dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi pemerintahan. Kesepakatan dimensi ekonomi dengan pengurangan biaya operasi untuk meningkatkan kapasitas pengiriman layanan, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, meningkatkan kapasitas respons untuk mengatasi tantangan dan peningkatan kemiskinan jalan untuk menghasilkan pendapatan. Manfaat sosial termasuk penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan peningkatan, meningkatkan keselamatan dan keamanan hidup dan properti warga antara lain.

Untuk menopang poin-poin tersebut berikut telah diidentifikasi beberapa manfaat *E government* (Dunia Bank, 2016, Transparency International, 2016): 1). Memfasilitasi sirkulasi dan implementasi program pemerintah 2). memfasilitasi arus informasi dari pemerintah kepada warga 3). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang telah menghasilkan pengurangan drastis korupsi. 4). Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi hambatan birokrasi yang dialami pemerintah operasi. 5). Mempertahankan keamanan kehidupan dan properti warga untuk sebagian besar. 6). Meningkatkan pemberian layanan terutama melalui pertukaran antardepartemen informasi dan penggabungan lembaga dan kementerian terkait, 7). Mengurangi biaya transaksi, tenaga, waktu, dan ruang yang dibutuhkan untuk pemerintahan yang baik. 8). Memperkuat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan dan memperluas partisipasi warga di Indonesia pemerintahan. 9). Membantu dalam mencapai pembangunan terutama dalam kaitannya dengan operasi pemerintah oleh memperkenalkan konsep-konsep baru dari E government. 10). Mengurangi korupsi dengan mempromosikan transparansi, membuka data pemerintah kepada publik pengawasan, dan dengan mengotomatisasi proses pemerintah, membatasi kebijaksanaan pejabat dan membatasi interaksi warga dengan petugas admin untuk mengakses layanan utama.

Faktanya bahwa sebagian besar negara di dunia telah memanfaatkan TIK dalam menjalankan atau melakukan urusan pemerintahan. Diyakini bahwa TIK menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat melalui konektivitas, dengan demikian membawa pemerintah lebih dekat ke massa. Melalui

cara ini, penyampaian layanan kepada massa jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah daripada cara tradisional yang dicirikan dengan pemborosan waktu dan hambatan birokrasi di sektor publik.

Aplikasi TIK modern telah banyak mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif dengan penyampaian layanan yang di tingkatkan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pemerintah telah melakukan investasi modal besar dalam memperkenalkan TIK di organisasi publik. Hal hal tersebut telah mempromosikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih efisien dan hemat biaya, membuat pemerintah memberikan layanan dalam waktu singkat kurang dari biasanya, memungkinkan akses gratis informasi oleh masyarakat umum, sehingga membuat pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab kepada warganya.

Dengan demikian, teknologi informasi telah membawa inovasi di sektor publik, menciptakan hubungan *e-citizen dan e-government* dalam lingkungan yang lebih dekat dan bersahabat. Ini berarti bisnis baru peluang diciptakan melalui penggunaan komunikasi informasi di sektor publik sebagai serta penyediaan layanan kolaboratif. Dimensi TIK untuk mempromosikan tata kelola menurut Sakowicz (2003) adalah;

- ***E-service***: dimensi ini adalah penggunaan elektronik untuk informasi pemerintah, program, strategi, dan pelayanan. *E-service* memberi penekanan pada bentuk-bentuk inovatif terhadap partisipasi warga dan pemberian layanan yang menunjukkan penilaian warga negara sebagai pelanggan administrasi. Tantangannya adalah memberikan layanan kepada anggota masyarakat dengan dimensi

seperti kualitas, kemudahan dan biaya. *E-service* tersedia secara on-line selalu.

- ***E-management*** atau ***E-Administration***: mengacu pada sistem informasi pendukung fungsi manajemen dan administrasi organisasi publik, termasuk manajemen data dan informasi, pemeliharaan catatan aliran informasi elektronik lintas-departemen. Dalam domain ini, *E government* secara khusus menangani peningkatan manajemen pemerintahan, dari mempersingkat proses bisnis hingga meningkatkan aliran informasi lintas departemen.
- ***E-demokrasi***: dalam konteks e-demokrasi, TIK digunakan sebagai alat untuk membantu mengatur agenda, menetapkan prioritas, membuat kebijakan penting dan berpartisipasi di dalamnya implementasi dengan cara deliberatif. Sebenarnya, e-demokrasi dalam kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterlibatan warga dalam kampanye dunia maya, jajak pendapat, dan survei publik.
- ***E-commerce***: dimensi ini terkait dengan sisi bisnis dari interaksi pemerintah yaitu pertukaran uang untuk barang dan jasa dilakukan melalui internet dalam *e-commerce*. Misalnya, warga membayar pajak dan tagihan listrik, memperbaharui registrasi kendaraan, atau kantor pembelian pemerintah memasok dan melelang peralatan surplus melalui online, pembelian atau e-procurement.

Kebijakan e-government dijalankan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi dan transparansi dalam pemberian layanan pemerintah untuk mereposisi pemerintah dalam ekonomi global. *E government* dan

Produktivitas. Pemerintah menerapkan *E government* untuk memastikan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dicapai dalam interaksi antara pemerintah dan pemerintah serta dengan warga. Kebutuhan untuk tetap mengikuti lingkungan administrasi yang terus berubah dan komunikasi adalah alasan utama mengapa lembaga-lembaga pemerintah di setiap tingkatan berbeda pendekatan TIK dalam operasi mereka.

Aplikasi *E government* dapat mengurangi biaya komunikasi, keamanan, pendidikan dan layanan kepada warga (Gant, 2008). Tujuan utama dari *E government* adalah untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, maka e-government meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas menyediakan barang dan jasa publik (Nchuchuwe dan Ojo, 2015).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian data sekunder yang diperoleh melalui studi Pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berupa berupa literatur dari hasil penelitian dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang didasarkan pada nilai, kualitas dan keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain, pencarian kebenaran dalam penelitian ini didasarkan dan diukur dengan kualitas, nilai dan keadaan data yang bersangkutan

**PEMBAHASAN**

**Penerapan *Open Government* di Indonesia**

Guna melaksanakan komitmen pada keterbukaan di Indonesia digerakkan

inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI) yang memiliki 3 pilar utama: transparansi, partisipasi, dan inovasi. OGI digerakkan oleh Tim Inti OGI, yang terdiri dari beberapa wakil kementerian/ lembaga dan organisasi masyarakat sipil (OMS), yang difasilitasi oleh sebuah Sekretariat OGI. Sejak awal, dalam penyusunan rencana-rencana dan prioritas *open government*, Tim Inti OGI telah melibatkan publik dalam menjangkau aspirasi masyarakat dalam menyusun rencana aksi *open government*, seperti mengadakan *focus group discussion* (FGD), *workshop*, dan pemanfaatan berbagai platform komunikasi massa dan media sosial berbasis internet.

Semangat keterbukaan juga yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global *Open Government Partnership* (OGP) pada September 2011. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 58 negara yang mewakili lebih dari 2 miliar penduduk dunia. Negara-negara yang bermitra dalam OGP ini berkolaborasi melampaui batasbatas politik dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk bersamasama menciptakan negara yang lebih baik. Negara

*Open Government Partnership* (OGP) adalah negara- negara yang bercita-cita untuk membawa perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemerintahan yang terbuka, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengungkapkan komitmennya pada *Open Government*. Dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2012, Presiden



Susilo Bambang Yudhoyono berkata, “Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government”.

Melalui gerakan Open Government Indonesia (OGI), pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program-program dan rencana aksi yang memperkokoh 3 pilar keterbukaan pemerintah, yaitu transparansi, partisipasi publik dan inovasi. Program dan rencana aksi OGI berjumlah 38, ditujukan untuk menjawab 3 dari 5 Tantangan Utama OGP, yaitu peningkatan layanan publik, peningkatan integritas aparatur pemerintah, dan manajemen sumber daya publik yang efektif dan transparan. Penyusunan dan pengawalan pelaksanaan program OGI telah diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat yang secara sukarela telah tergabung dalam Tim Inti Open Government Indonesia. Tim Inti OGI yang bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi program-program OGI. Upaya terobosan lain dalam *Open Government* di Indonesia termasuk beroperasinya portal Satu Layanan, yang saat ini telah berisi lebih dari 100 modul informasi layanan warga negara, mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.

Dalam sisi kelembagaan, *Open Government* di Indonesia juga mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah. OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan

ini telah membawa perubahan paradigma: OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan *civitas akademika* bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI.

### ***E-Government* sebagai Pendukung *Open Government***

Implementasi *E government* menunjukkan semua kegiatan pemerintah menggunakan elektronik atau sarana digital. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat berguna dalam kegiatan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, keamanan dan pemerintahan. Namun, sejumlah tantangan dan hambatan telah dikaitkan dengan *E government* di negara-negara berkembang. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2016, sekitar 30% program *E government* gagal karena ditinggalkan sebelum selesai sementara kurang dari 20% berhasil. Dalam kasus yang berhasil, pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik sehingga hasilnya tidak optimal. Implementasi yang buruk karena kurangnya regulasi yang memadai bahkan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar yaitu peluang terjadinya praktik korupsi dan penipuan (World Bank 2016).

Sejalan dengan hal di atas, Adejuwon (2012); Kamar & Ongo'ndo (2007); Abasilim (2015) meringkas tantangan implementasi *E government* di Negara berkembang sebagai:

1. Alokasi pendanaan yang tidak memadai karena kendala keuangan

<p>dan kebijakan pemerintah telah memperlambat pelaksanaan <i>E government</i>.</p>	<p>TIK yang tersedia di berbagai instansi pemerintah.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perencanaan yang tidak memadai dan ketidakstabilan politik;</li> <li>3. Ketidakamanan fasilitas sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola fasilitas TIK.</li> <li>4. Keengganan untuk berbagi informasi yang mengakibatkan timbulnya kebijakan menolak akses informasi dan pembuatan situs web kementerian sehingga isinya “kosong” dengan informasi yang sangat sedikit</li> <li>5. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola dan mengimplementasikan program-program <i>E government</i> untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah dan e-konten yang tidak mencukupi informasi dari tingkat bawah.</li> <li>6. SDM yang tidak memadai untuk mengawasi program TIK.</li> <li>7. Peyebaran layanan internet tidak teratur dengan biaya koneksi tinggi</li> <li>8. Tidak dapat diaksesnya situs e-government oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perdesaan dengan tingkat melek huruf dan pendapatan rendah</li> <li>9. Pasokan listrik yang buruk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) komitmen dan kesungguhan di antara aparat pemerintah untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan program TIK yang tersedia.</li> <li>4) <i>E government</i> memerlukan fasilitas instalasi dan pemeliharaan secara berkelanjutan, oleh karena itu memerlukan pelatihan SDM untuk mengelola dan memelihara fasilitas untuk menjaga agar program tetap berjalan dan menghemat biaya.</li> </ol>
<p>Untuk mengatasi berbagai tantangan E-government di Indonesia, direkomendasikan beberapa hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepatuhan yang ketat terhadap penggunaan TIK oleh lembaga pemerintah.</li> <li>2) melembagakan langkah-langkah menghasilkan dana yang cukup untuk menopang dan meningkatkan fasilitas</li> </ol>	<p><i>E-government</i> sebagai salah satu bentuk reformasi administrasi publik di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemerintahan terbuka (<i>open government</i>). Pemanfaatan internet, komunikasi dan teknologi (TIK) dalam pemerintahan dan pelayanan publik semakin diutamakan dan menjadi strategi efektif dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik karena TIK diasumsikan dapat mengurangi waktu dan jarak antara penyedia layanan dan komunitas atau pelanggan. Survei <i>E government</i>. Perserikatan Bangsa-Bangsa 2016 melaporkan bahwa negara-negara yang mengimplementasikan <i>e-government</i> dalam menyediakan layanan publik online melalui <i>one stop-platform</i> terus meningkat. Pada 2003, hanya 45 negara memiliki platform satu atap, dan hanya 33 negara yang menyediakan transaksi online. Menurut Survei 2016, terdapat 90 negara yang saat ini kini menyiapkan satu atau lebih jaringan portal masuk untuk informasi publik atau layanan online, atau keduanya dan 148 negara menyediakan minimal satu bentuk layanan transaksional online. Implementasi <i>e-government</i> bertujuan untuk memastikan lembaga pemerintah lebih inklusif, efektif,</p>

akuntabel dan transparan. Negara di seluruh dunia, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan membuka informasi publik dan pengawasan, 128 negara sekarang menyediakan data pemerintah dalam format yang dapat dibaca melalui online atau mesin.

Transparansi melalui *E government* dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya membuka data dan memberi informasi publik dan pengawasan. *E government* telah ditetapkan sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia yang pelaksanaannya diperkuat dengan Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional. Kebijakan ini adalah merupakan implementasi pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan kompetitif, adil dan bertanggung jawab. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya, bab 4 tentang prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan publik. Hingga saat ini, implementasi *e-government* di Indonesia telah mencakup berbagai peran dan fungsi pemerintahan.

Dengan adanya regulasi yang mengatur *e-Government* dari pusat hingga daerah akan memudahkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Regulasi memberikan kepastian hukum dan ketegasan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat untuk melakukan terobosan dan inovasi yang kreatif sehingga dapat menjawab persoalan yang dihadapi dalam pemerintahan. Selain itu, regulasi meningkatkan fungsi dan koordinasi dari masing-masing K/L dan instansi pemerintahan di tingkat sub-nasional.

Implementasi *e-Government* yang diiringi dengan pemahaman dan penghayatan dari prinsip-prinsip *open government* berimplikasi terhadap perubahan pola pikir dari para pengguna, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasinya tidak dapat hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja. Prinsip *open government* menekankan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat terjadi secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak swasta memberi dukungan dalam peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Bentuk dan model kerja sama tersebut dapat tumbuh dan dipelajari dalam ruang demokrasi memberi ruang kebebasan kreativitas yang berbeda dari kebiasaan birokrasi selama ini. Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam *Open Government* Indonesia merupakan sebuah model yang mutlak direplikasi pada tingkat sub-nasional.

Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi pemahaman dan praktik *open government* dan promosi pelaksanaan secara berkelanjutan akan meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam menggunakan hak sipilnya. Sosialisasi mengenai SPPN yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan masyarakat luas mengetahui hak dan kewajibannya dalam tata kelola pemerintahan. Karena dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai SPPN, maka akan semakin tinggi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan, perencanaan, program dan anggaran di daerahnya.

Merefleksikan dan melakukan pembelajaran terhadap pelaksanaan *open*

*government* dan penggunaan *E government* merupakan komponen mutlak untuk melihat capaian, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, dan hal-hal terkait yang relevan untuk diadaptasi dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan terbuka. Hal ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *open government* dan penggunaan *E government*, atau dengan riset secara berkala sehingga dapat dilakukan perbaikan dan/atau perubahan yang relevan dengan berdasarkan fakta nyata.

Berdasarkan peta jalan e-government Indonesia implementasi e-government di Indonesia Indonesia menggunakan pendekatan 4 C yaitu: pengembangan berorientasi pada Citizen, perbaikan berkesinambungan, proses kolaboratif, terhubung dengan akses multichannel. Namun, Huang (2016) mempelajari tentang implementasi e-government di Indonesia menemukan tiga tantangan yang berbeda terhadap inovasi digital yaitu: Kompetisi vs Kolaborasi (persaingan dan konflik kepentingan institusional, baik di dalam maupun lintas sektor); Integrasi vs Disintegrasi ; Eksklusivitas vs Inklusivitas (teknokrat dan orang-orang).

### **Hambatan Penerapan *E-government***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah daerah masih berada pada tingkat persiapan, apabila ditinjau dari sejumlah aspek, di antaranya:

- ***E-Leadership***: prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

- Infrastruktur Jaringan Informasi ; kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup dan biaya jasa akses.
- Pengelolaan Informasi ; kualitas dan keamanan pengelolaan informasi
- Lingkungan Bisnis ; kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi
- Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Selain itu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan *e-government* yaitu ; pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah; belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government; inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentifikasi dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antarsitus secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.

Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi

ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah; belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government* pada masing-masing instansi; inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antarsitus secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian; pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Inefisiensi dalam administrasi pemerintah dapat ditemukan dengan keberadaan basis data nasional yang terpisah-pisah, seperti basis data kependudukan, pertanahan, kendaraan bermotor, dan pajak. Memiliki basis data terpisah berarti bahwa masyarakat harus melakukan registrasi rangkap, melalui proses kertas kerja yang panjang untuk berbagai perizinan dan membutuhkan beberapa kali kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah menyediakan berbagai layanan, meliputi penerbitan berbagai surat/izin, konsultasi, pemrosesan petisi masyarakat, pembayaran elektronik, dan penyebaran informasi pemerintah.

Pendekatan multi kanal dilakukan untuk menjamin partisipasi maksimal dari masyarakat dan pebisnis dalam

*e-government* mengingat masing-masing kelompok akan memiliki tingkatan akses yang berbeda terhadap masing-masing kanal. Sebagai contoh, masyarakat pedalaman cenderung tidak memiliki akses terhadap kanal elektronik (seperti Internet, e-mail, handphone, TV digital) dibandingkan masyarakat perkotaan.

Sangat banyak lembaga pemerintah yang menyatakan bahwa sudah mengaplikasikan *e-government* yang pada kenyataannya lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahap *web presence*, masih belum terlihat adanya penerapan *e-government* yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan *e-government* belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Seorang warga harus secara face to face mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut.

Keterbatasan yang paling nampak dari pembangunan websites di pemprov adalah masih dalam tahapan pematangan atau masih sampai pada fase penyediaan ruang komunikasi interaktif saja, sementara fase ke tahapan lanjut yaitu fase pematapan berupa ketersediaan pelayanan publik serta pemanfaatan berupa layanan lintas instansi masih belum menunjukkan ke arah sana.. Secara kuantitatif situs web pemkab dan pemkot ternyata masih sangat sedikit, meskipun secara kualitas baik dalam arti

sudah sesuai dengan beberapa standar yang diperlukan dalam pembangunan web ber-dasar panduan yang dikeluarkan oleh KOMINFO. Namun kekurangannya juga sama dengan hampir semua situs web pemprov yaitu masih berada pada tahapan web presence atau tahapan pematangan, meskipun beberapa di antaranya sedang bergerak ke arah fase ke tiga.

Pada jajaran lembaga tinggi dan lembaga non depar-temen, secara faktual kuantitatif dan kualitas maka nampak sekali perbedaannya dengan situs web pemda. Umumnya hampir setiap lembaga non pemerintahan telah memiliki situs web dan rata-rata optimalisasi fasilitas di dalamnya sudah mampu mendahului jenjang tingkatan situs pemda. Indikator tersebut dapat dilihat dari berbagai fasilitas link dan layanan yang ada pada situs lembaga yang mendekati kesempurnaan fase ke tiga yang terdiri dari aplikasi formulir dan sebagainya. Salah satu contoh situs lembaga yang telah mengoptimalkan situs web nya adalah [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id). Dari web ristek tersebut sudah mampu membuat aplikasi pendaftaran online dalam rangka hibah maupun tawaran bantuan pembiayaan dalam riset dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi *e-government* di Indonesia lebih banyak didominasi oleh situs milik pemprov, pemkab dan pemkot. Namun, situs-situs yang melayani masyarakat dalam urusan umum tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitas maupun kualitasnya. Masih ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak pemda dalam hal mewujudkan implementasi *e-government* yang ideal.

Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem

manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government*. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentifikasi dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antarsitus secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Open Government adalah alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah negara untuk memperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat. Kebijakan ini menghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakan kebijakan tersebut. Contoh kunci dari kebijakan di atas meliputi: memastikan hasil kebijakan yang lebih baik; meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ;Memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan ;mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif ; membina inovasi

Secara umum, Indonesia menghadapi tantangan dalam menerjemahkan komitmen keterbukaan di tingkat daerah, menerjemahkan tujuan umum menjadi tujuan-tujuan khusus, dan memastikan komitmen dari kementerian/lembaga terhadap proses keterbukaan. Terlebih lagi, keikutsertaan cabang legislatif dan yudikatif dalam proses reformasi open government masih sangat terbatas. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah Indonesia perlu mencari cara untuk mengembangkan pendekatan “negara terbuka” yang akan mengesahkan kerja sama di antara badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai tingkat pemerintahan lainnya, dalam isu-isu *open government* untuk mendorong agenda yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Untuk mendukung pendekatan ini, pemerintahan pusat telah menyusun kebijakan nasional tentang keterbukaan pemerintah untuk mendukung reformasi dan pengarusutamaan keterbukaan pemerintah (*open government*) serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam reformasi sektor publik saat ini.

Implementasi *e-government* Indonesia saat ini, dilihat dari sisi aplikasi layanan hingga saat ini masih belum terlaksana secara optimal, hal itu disebabkan oleh kurangnya komitmen dari para stakeholders. Penerapan TIK yang belum merata, tingkat kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang juga tercermin pada budaya kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan. Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah baik itu tentang tujuan penerapan, manfaat bahkan strategi pengembangan *e-government* belum sepenuhnya dilaksanakan. Sampai saat ini layanan portal hampir dimiliki oleh hampir semua lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah, tetapi pemanfaatan TIK dalam hal ini masih sangat minim, administrator web hanya melakukan update berdasarkan informasi sekunder seperti dari surat kabar, internet dan hasil perbandingan opini publik.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia sudah jelas tertinggal. Di dua negara tersebut, layanan yang sifatnya

back office bahkan sudah terintegrasi dengan layanan yang sifatnya front office, seperti adanya layanan MyCad di Malaysia, pasport online di Singapura atau bahkan layanan bea cukai online yang sudah diterapkan di Inggris. Sedangkan implementasi layanan *e-government* yang ada di Indonesia saat ini untuk lembaga pemerintah seperti layanan pajak, download berkas, registrasi tetapi untuk pengaktifan anggota masih berlaku sistem manual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fitriansyah, H. B. (2013). Metode pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) untuk tata kelola teknologi informasi. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*. Jakarta: Sesindo.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Aprianty, D. r. (2016). • Penerapan kebijakan *e-Government* dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor kecamatan sambutan kota Samarinda. *ejournal ilmu pemerintahan*.
- Bappenas, 2016, *Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016 – 2017*.
- Abasilim, UD & Edet, LI (2015) E government and its implementation challenges in the Indonesian public service, ACTA Universitatis Danubius, Vol. 7 (1), pp: 30-42
- Akinleke, WO (2015). The contributory effects of socio-cultural factors on *e-government* adoption among Indonesians, *Global journal of politics and law research*, Vol.3 (1), pp.91- 104.
- Ananti, MO & Umeifekwem, U. (2012) Work Ethics and Productivity in Local

<p>Government System in Indonesia: Problems and Prospects, African Research Review, An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia, Vol. 6(1), Serial No. 24</p>	<p>Ehi Eric, A Critical Analysis of the Bank Verification Number Project Introduced by the Central Bank of Indonesia (January 3, 2015). Available at SSRN: <a href="https://ssrn.com/abstract=2544934">https://ssrn.com/abstract=2544934</a> or <a href="http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2544934">http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2544934</a></p>
<p>Brussell, J. (2011). Explaining cross-national variation in government adoption of new teknologi. <i>International Studies Quarterly</i>, Vol. 55 (1), pp: 267-280.</p>	<p>Eme, OI &amp; Chukwurah, DC (2015) An analysis of pros and cons treasury single account policy in Indonesia, <i>Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)</i> Vol. 5, (4).</p>
<p>Bank Dunia. (2009). Information and communications for development: Extending reach and increasing impact. Washington, DC: Bank Dunia. <a href="http://issuu.com/world.bank.publications.d.ocs/9780821376058">http://issuu.com/world.bank.publications.d.ocs/9780821376058</a>. World Bank Development Report (2016) Digital Dividends. Available on <a href="http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016">www.worldbank.org/en/publication/wdr2016</a>, retrieved on 11/5/2017</p>	<p>Fang, Z. (2002) E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development, <i>International Journal of The Computer, The Internet and Management</i>, Vol. 10(2), pp: 1-22 Fatile,</p>
<p>Cornforth, C. (2003). The government of Voluntary and Community Organisations: An Overview. Co-operatives UK.</p>	<p>Jacob Olufemi (2012) Electronic Governance: Myth or Opportunity for Indonesian Public Administration? <i>International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences</i>, Vol. 2, (9), pp: 122-140</p>
<p>Choudrie, J., Umeoji, E. &amp; Forson, C. (2012). Diffusion of e-government in Indonesia: A qualitative study of culture and gender. University of Hertfordshire Business School Working Paper. Diterima dari <a href="https://uhra.herts.ac.uk/dspace/handle/2299/5549">https://uhra.herts.ac.uk/dspace/handle/2299/5549</a>, 15/5/2017</p> <p>Dawes, SS (2008).</p>	<p>Federal Ministry of Science and Technology (2015) Policy on ICT for good governance and Elections in Indonesia, available on <a href="http://www.scienceandtech.gov.ng/docs/ICT_for_Good_Governance_and_elections_in_Indonesia.pdf">http://www.scienceandtech.gov.ng/docs/ICT_for_Good_Governance_and_elections_in_Indonesia.pdf</a>, retrieved on 15/05/2017</p>
<p>Dewi, A. S. (2013). <i>Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi e-Government (studi pada pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia)</i>. Semarang: Fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Diponegoro</p>	<p>Fraga, E. (2002). Trends in e-Government: how to plan, design, and measure e-Government. Government Management Information Sciences (GMIS) Conference, June 17, Santa Fe, New Mexico, USA Fukuyama,</p>
<p>Ehi, EE (2015) A Critical Analysis of the Bank Verification Number Project Introduced by the Central Bank of Indonesia, pp: retrieved from Esoimeme,</p>	<p>Francis (2013). What is governance? Centre for working development, Working Paper 314 January 201, Washington retrieved from <a href="http://www.cgdev.org">www.cgdev.org</a> on 10/05/2017</p> <p>Gant, JP (2008). The electronic government for developing countries. Policies and Strategies, International Telecommunication Union, August 2008 DRAFT,</p>



<p>Geneva. Gianluca CM (2007). E government in Africa: from theory to action. A handbook on ICTs for local governance. Trenton, New Jersey, Africa World Press, Inc.</p>	<p>presented at fourth international conference on development studies, University of Abuja, FCT, Indonesia</p>
<p>Kamar N, Ongo'ndo M (2007). Impact of e-Government on management and use of government information in Kenya, World Library and Information Congress: 73 rd IFLA general conference and Council, pp. 19-23 August 2007,</p>	<p>E-Government: Towards a Public Administration Approach, Asian Journal of Public Administration Vol 25(2) 159-183</p>
<p>Durban, South Africa kaimahi, T. K (2014). More effective social services. New Zealand Productivity Commission, Selandia. Available on: <a href="http://productivity.govt.nz/sites/default/files/social-services-issues-paper-nov.pdf">http://productivity.govt.nz/sites/default/files/social-services-issues-paper-nov.pdf</a>. Retrieved on 11/05/2017</p>	<p>Romle, AR, and Udin, MM (2016) The implementation of ICT towards improving service quality in public sector. World Applied Sciences Journal, Vol. 34 (4), pp: 499-505</p>
<p>Muhammed. S, et al (2010). E government in Indonesia: a catalyst for national development, being a paper,</p>	<p>Suleiman Sa'ad, Abubakar, M. &amp; Mohammed, BR (2015) E government and effective service Delivery in Indonesia, International Journal of Advanced Studies in Business Strategies and Management, Vol. 3 No. 1, pp: 32-39 United States E-Government Act of 2002, Section 3601 retrieved from <a href="http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107">http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107</a></p>